

## PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL

**Margareta Philipa Rosalin**  
*margarethairra@gmail.com*  
**Ikhsan Budi Riharjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research is meant to find out the influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund to the capital expenditure of districts/cities in East Nusa Tenggara Province. Quantitative method has been applied in this research. The population is all districts/cities in East Nusa Tenggara Province which consist of 22 districts and 1 city. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. The samples are 20 districts/cities in East Nusa Tenggara Province in 2013-2015 periods. The data has been carried out by using the secondary data which has been obtained from budget realization statement. The data analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions method. The result of this research shows that General Allocation Fund does not give any influence to the capital expenditure. Meanwhile, Special Allocation Fund give positive influence to the capital expenditure, moreover the Profit Sharing Fund give negative influence to the capital expenditure at districts/cities in East Nusa Tenggara Province.*

*Keywords: General allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund toward capital expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 22 kabupaten dan 1 kota dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang didapat berjumlah 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran. Adapun teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sementara Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci : Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap belanja modal.

### PENDAHULUAN

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah perwujudan dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Kewenangan yang diterima oleh daerah melalui otonomi daerah memberikan kebebasan kepada Daerah dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat diwilayahnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2002:24) Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah tanpa harus meminjam dan tergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramanda, 2010). Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah. Peran strategi pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman dalam menyusun anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD (Nordian et al, 2007:40). Dalam pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah dengan adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (Sidik, 2002). Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang sifatnya khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam anggaran belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah

guna meningkatkan pelayanan publik. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah untuk melihat penghasil angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Listiorini, 2012). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Daerah-daerah yang kapasitas rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemrin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002). Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik investasi ini (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal dengan baik karena merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) PAD dana DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel-variabel yang digunakan adalah Dana perimbangan dan belanja modal.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal? 2. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal? 3. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal. 2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal. 3. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap anggaran belanja modal.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Dana Alokasi Umum**

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pengalokasian dana alokasi umum untuk tiap-tiap daerah didasarkan atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh dengan mengurangi jumlah kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan besarnya alokasi dasar ditentukan berdasarkan total gaji Pegawai Negeri Sipil Dearah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat "Bock Grant" yang artinya ketika dan tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Nordiawan *et al.* (2007:56) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut Nordiawan *et al.* (2007:56) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, serta saluran irigasi primer. 2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 2. Pajak penghasilan (Pph pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari: kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi, Pertambangan Panas bumi.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2004:73). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh dan menambah aset tetap atau aset lainnya dalam memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin. belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya. Kriteria dari aset tetap adalah berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan kriteria dari aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material.

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja modal**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal ini disebabkan karena adanya

transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi, terdapat keterkaitan antar dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan pada bagian investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Penelitian Tausikal (2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara persial terhadap Belanja Modal hal yang sama juga dikatakan oleh Setyowati Lilis dan Yohana Kus Suparwati (2012) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan belanja modal pemerintah daerah.

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang di transfer pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Besarnya realisasi Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi dihasilkan, juga tergantung pada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentasi daerah penghasil. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Wandira (2012) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu menitik beratkan pada pengujian hipotesis, data yang analisis, sifatnya terukur dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan generalisasi. Obyek penelitian adalah seluruh Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 22 kabupaten dan 1 kota. Populasi dari penelitian ini adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dalam populasi tersebut adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tetapkan. Berdasarkan Populasi dalam penelitian ini maka pertimbangan yang di maksud dalam purposive sampling adalah : (1) Kabupaten/Kota yang terdaftar di Badan Pemeriksaan

Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Laporan Realisasi Anggaran yang selalu di tertib di tahun 2013-2015.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Dari laporan realisasi APBD tahun 2013-2015 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel ini yang dibagi menjadi variabel independen dan dependen yang merupakan variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur.

#### **Variabel Independen**

##### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

##### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam anggaran belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

##### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu model dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **Variabel Dependen**

##### **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh dan menambah aset tetap atau aset lainnya dalam memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin. Belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset lainnya. Kriteria dari aset tetap

adalah berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan kriteria dari aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material.

### **Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

### **Regresi Linier Berganda**

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Metode regresi linier berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal.

$$\text{BMD} = a + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{DAK} + \beta_3 \text{DBH} + e$$

Keterangan :

BMD	= Belanja Modal
a	= Konstanta
$\beta$	= Slope atau koefisien regresi
DAU	= Dana Alokasi Umum (DAU)
DAK	= Dana Alokasi Khusus (DAK)
DBH	= Dana Bagi Hasil (DBH)
e	= error

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui dan menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Tujuan asumsi klasik adalah agar dapat menghasilkan nilai parameter yang baik sehingga hasil penelitian dapat diandalkan. Syarat-syarat yang harus di penuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas.

### **Uji Normalitas**

Uji normalitas ini yaitu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal.

### **Uji Multikolinieritas**

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independe. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinieritas (Ghozali, 2006). Untuk mengatasi multikolinieritas dapat digunakan dengan cara menambah sampel, sehingga terjadi multikolinieritas. Penambahan sampel dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan satu variabel atau lebih yang memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel yang lain.

### **Uji Autokorelasi**

Digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model *Durbin-watson*. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi.

### **Uji Heterokedastisitas**

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji kelayakan digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil layak atau tidak digunakan dalam model penelitian. Maka Jika Uji F hitung  $>$  F tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Jika Uji F hitung  $<$  F tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara Nol dan Satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

#### **Uji t (Uji parsial)**

Uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada level *level of significant* 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut Jika t hitung  $>$  t tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak dan Jika t hitung  $<$  t tabel maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif**

Statistik Deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Alokasi Umum	60	26,26	27,27	26,8230	,24381
Dana Alokasi Khusus	60	22,11	26,04	25,0074	,49439
Dana Bagi Hasil	60	22,65	24,04	23,3423	,28849
Belanja Modal	60	25,01	26,43	25,6157	,31378
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder diolah

### Metode Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara linier.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	20,640	4,021			5,133	,000
Dana Alokasi Umum	,294	,151	,228		1,939	,058
Dana Alokasi Khusus	,269	,070	,424		3,852	,000
Dana Bagi Hasil	-,412	,125	-,379		-3,290	,002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah

Dari data tabel di atas persamaan regresi yang didapat adalah  $BMD = 20,640 + 0,294 + 0,269 - 0,412$ . Besarnya nilai konstanta adalah 20,640 menunjukkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak ada perubahan, maka variabel belanja modal sebesar 20,640. (1) Besarnya nilai  $\beta_1$  adalah 0,294 menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara dana alokasi umum dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Besarnya nilai  $\beta_2$  adalah 0,269 menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara dana alokasi khusus dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) Besarnya nilai  $\beta_3$  adalah -0,412 menunjukkan arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara dana bagi hasil dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Asumsi Klasik yang telah dilakukan diperoleh yaitu sebagai berikut:

#### Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan pendekatan grafik, yaitu grafik Normal P-P Plot of regression standard. Distribusi data mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum Prob*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob*) Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson. Uji autokorelasi Durbin Watson dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya.

**Tabel 3**  
**Batas-batas Daerah Test Durbin Watson**

Distribusi	Interpretasi
$DW < 1,480$	Autokorelasi positif
$1,480 \leq DW < 1,689$	Daerah keragu-raguan/inconclusif
$1,689 \leq DW < 2,311$	Tidak ada autokorelasi
$2,311 \leq DW < 2,520$	Daerah keragu-raguan/inconclusif
$DW \geq 2,520$	Autokorelasi negative

Sumber: Data sekunder diolah

### Uji Multikolinieritas

Semua variabel bebas yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak ada yang memiliki nilai VIF melebihi 10. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel yang digunakan model penelitian tersebut tidak memiliki keterikatan atau hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan model penelitian tidak terjadi gangguan multikolinieritas.

**Tabel 4**  
**Nilai Variance Inflation Faktor**

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
Dana Alokasi Umum	0,776	1,288	Bebas Multikolinieritas
Dana Alokasi Khusus	0,888	1,127	Bebas Multikolinieritas
Dana Bagi Hasil	0,809	1,236	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah

### Uji Heteroskedastisitas

Sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Hasil pengujian klasik setelah merubah model analisis dalam bentuk menunjukkan bahwa secara eksplisit tidak terdapat asumsi yang terlanggar, sehingga model analisis layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji kelayakan digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil layak atau tidak digunakan dalam model penelitian.

**Tabel 5**  
**Anova**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2,314	3	,771	12,361	,000 <sup>b</sup>
Residual	3,495	56	,062		
Total	5,809	59			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum  
Sumber: Data Sekunder diolah

Dari tabel diatas tingkat signifikan uji F = 0,000 < 0,05 (*level of signifikan*), yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase kontribusi yang diberikan oleh model yang digunakan dalam penelitian yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 6**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,631 <sup>a</sup>	,398	,366	,24981	1,696

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel di atas R square ( $R^2$ ) sebesar 0,398 yang menunjukkan sumbangan atau kontribusi dari model yang digunakan dalam penelitian dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 39,8%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 39,8\% = 60,2\%$ ) dikontribusi oleh faktor lainnya.

### Uji t

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t yaitu menguji koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing model yang digunakan dalam penelitian yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 7**  
**Hasil Perolehan Tingkat Signifikan**

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	Keterangan
Dana Alokasi Umum	0,294	0,058	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus	0,269	0,000	Signifikan
Dana Bagi Hasil	-0,412	0,002	Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa (1) Variabel dana alokasi umum sebesar  $0,058 > \alpha = 0,050$  maka  $H_1$  ditolak. Kondisi ini menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak signifikan. (2) Dana alokasi khusus sebesar  $0,000 < \alpha = 0,050$ , maka  $H_2$  diterima. Kondisi ini menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur signifikan. (3) Dana bagi hasil sebesar  $0,002 < \alpha = 0,050$ , maka  $H_3$  ditolak. Kondisi ini menunjukkan pengaruh negatif Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur signifikan.

## Pembahasan

### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana alokasi umum disesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran daerah. Semakin besar tingkat kebutuhan pengeluaran daerah maka semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah.

Ketidaksignifikan dalam penelitian ini dimungkinkan karena dana alokasi umum secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan umum yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas dan menjadi urusan daerah pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, terjadi transfer yang tidak signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah tidak dapat secara leluasa menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Hasil ini tidak didukung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh terhadap belanja modal disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan Pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin dana alokasi khusus dialokasikan pada bagian investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang semakin belanja modal yang dikeluarkan.

Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tausikal (2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil**

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini memperlihatkan rendahnya dana bagi hasil yang diperoleh sedangkan alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin meningkat. Dana bagi hasil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hubungan negatif antara dana bagi hasil dengan belanja modal kabupaten/kota dimungkinkan karena penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam semakin rendah, sehingga anggaran dana bagi hasil belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal yang terus meningkat. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Wandira (2012) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil pengujian memperlihatkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Dearah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini mengindikasikan dana alokasi umum secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan umum yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas dan menjadi urusan daerah pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil pengujian kedua memperlihatkan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Dearah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil pengujian terakhir memperlihatkan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada Pemerintah Dearah/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil ini memperlihatkan dana bagi hasil dengan belanja modal Kabupaten/Kota memiliki persentase yang rendah, sehingga anggaran dana bagi hasil belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal yang terus meningkat.

### **Saran**

Dari hasil analisis tersebut di atas dan kesimpulan yang diporeh, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Hendaknya pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam pembangunan daerahnya. Hal ini dilakukan agar alokasi dana pembangunan yang berasal dari Belanja Daerah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang utama bagi masyarakatnya. Untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran agar selalu terjadi susunan yang seimbang dalam APBN maupun APBD, hendaknya pemeritah daerah mengusahakan

adanya pengaturan pengeluaran pemerintah, diantaranya dengan melakukan efisiensi dalam belanjanya. Dan bagi peneliti berikutnya hendaknya lebih diperbanyak jumlah sampel, periode serta pengamatan untuk lebih diperpanjang, serta memperhitungkan kondisi ekonomi dan letak geografis suatu daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto dan Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. UNHAS Makassar.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ibrahim, M.J. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara Prize Machfud Sidik, "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional". Seminar Nasional : public sector score card, Jakarta.
- Listiorini. 2012. Fenomena *Flypaper Effect* pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4(2): 111-126.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Muliati dan Weni. 2007. *Ekonomi untuk Siswa Kelas XI SMA-MA*. Bandung: Arca Media Utama. Hal: 29-35.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahardjo, A. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ramanda, R. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Riau. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyowati, L. dan Y.K. Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal* 9(1): 113-133.
- Siregar, B dan B. Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah disampaikan dalam acara Orasi Ilmiah*. STIA LAN Bandung.

- Sunardi, H.S dan B. T. Purwanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTS*. Jakarta Global: 49-57.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. ALPHABET. Bandung.
- Tuasikal. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kinerja Pemerintah Daerah. (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. ISSN:1410-8623.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Perkapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi kasus di Provinsi Sumatera Utara). *Tesis USU*.
- Waluya, J.A. 2006. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur). *Jurnal Humanity*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Walpole, R.E. 1995. *Pengantar Statistika*. Edisi Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wandira. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1(3).
- Yuwono, S., T.A Indrajaya, dan Hariyandi. 2005. *Pengangguran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.